

INTISARI

Latar Belakang: Menurut Permenkes Nomor 82 tahun 2015, program Jampersal Baru yang dikeluarkan tahun 2016 ini memiliki aturan dan penggunaan yang berbeda dari tahun sebelumnya. Dana ini digunakan untuk memobilisasi ibu hamil untuk melaksanakan persalinan di fasilitas kesehatan, mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, nifas dan bayi baru lahir terutama di daerah sulit akses ke fasilitas kesehatan melalui penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK). Kabupaten TTU juga menerima dana Jampersal yang masuk dalam daerah sulit akses dan masih kekurangan SDM, sarana dan prasarana kesehatan serta cakupan persalinan yang masih rendah.

Tujuan Penelitian: Mengevaluasi Implementasi Jampersal Baru di Kabupaten TTU Provinsi NTT Tahun 2016.

Metode: Jenis penelitian deskriptif, dengan metode kualitatif menggunakan rancangan studi kasus tunggal terjal. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Pengumpulan data dengan wawancara mendalam terhadap 17 informan dan telaah dokumen di Dinas Kesehatan, Puskesmas dan masyarakat.

Hasil: Evaluasi Implementasi Jampersal Baru menemukan bahwa ketersediaan dan kualitas tenaga pengelola RTK masih kurang, adanya kendala dalam pemanfaatan dana Jampersal, RTK tersedia tetapi kurang dimanfaatkan, sudah ada sinergitas antara Jampersal dan JKN, kurangnya pengawasan terhadap SOP, persalinan di fasilitas kesehatan belum meningkat dan kasus komplikasi kehamilan dan neonatal dapat ditangani dengan baik di Puskesmas.

Kesimpulan: Implementasi Jampersal Baru belum optimal untuk meningkatkan cakupan persalinan di fasilitas kesehatan. Perlu kerjasama lintas sektor untuk melakukan sosialisasi, konseling dan pengawasan agar cakupan persalinan di fasilitas kesehatan meningkat dan kasus komplikasi ibu hamil, Ibu nifas dan bayi baru lahir menurun.

Kata Kunci: Evaluasi Implementasi, Jampersal Baru, Kabupaten TTU.

ABSTRACT

Background: According to Permenkes Number 82 of 2015, the new Jampersal (childbirth insurance fund) program issued in 2016 has different rules and usage from the previous year. These funds are used to mobilize pregnant women to carry out deliveries at health facilities, bring closer access and prevent delayed treatment of pregnant women, delivery processes, postpartum issues, and newborns, especially in remote areas to health facilities through the provision of Rumah Tunggu Kelahiran (RTK). TTU District also receives Jampersal funds which are included in difficult access areas and lack of human resources, health facilities and infrastructure, also low coverage of safe birth.

Objective: Evaluating the implementation of new Jampersal in TTU District of NTT Province in 2016.

Methods: This research used descriptive research type, with qualitative method using embedded single case study design. Sampling technique used was purposive sampling. The data was collected through in-depth interviews of 17 informants and document review at the Health Office (Dinas Kesehatan), Puskesmas and community.

Results: This study found that the availability and quality of RTK's human resources is still lacking, the constraints in the utilization of Jampersal funds, there are some RTK are available but underutilized, there is already synergy between Jampersal and JKN, the lack of supervision of SOP, delivery in health facilities has not increased and cases of pregnancy and neonatal complication can be handled well in Puskesmas.

Conclusion: Implementation of new Jampersal has not been optimal yet to increase coverage of delivery at health facilities. It is necessary to conduct cross-sectoral cooperation to conduct socialization, counseling and supervision so that coverage of delivery in health facilities is increasing and cases of complications of pregnant women, postpartum and newborn infants decreased.

Keywords: Evaluation of implementation, new Jampersal, TTU District.